

KABINET GOTONG ROYONG DAN PESAN *GOOD GOVERNANCE*

Sofian Effendi

Melalui Kabinet Gotong Royong (KGR), Presiden Megawati Sukarnoputri telah menunjukkan manuver politik yang piawai dan berhasil memberikan impresi yang positif pada berbagai lapisan masyarakat. Sekarang sudah tumbuh dan berkembang pendapat pada berbagai masyarakat termasuk pelaku ekonomi, kalangan birokrasi, pengamat politik, dan masyarakat kampus bahwa Kabinet Gotong Royong yang dilantik pada hari Jum'at 10 Agustus yang lalu adalah kabinet yang cukup tangguh. Pandangan tersebut didasarkan atas kenyataan bahwa 26 dari 32 jabatan menteri dan setingkat menteri dijabat oleh para profesional yang menguasai bidang tugas masing-masing. Karena itu amat beralasan kalau di masyarakat luas sekarang muncul kembali harapan yang telah hilang selama 21 bulan yang lalu bahwa Kabinet Gotong Royong akan mampu mengatasi krisis ekonomi, politik dan social yang sedang dihadapi oleh Bangsa Indonesia.

Kalau impresi publik mengenai kompetensi pengelolaan ekonomi dan politik dari KGR cukup kuat dan merupakan modal besar bagi pemerintah dalam menyukseskan program-program rehabilitasi ekonomi serta dalam memerkokoh stabilitas politik nasional, tidak demikian halnya dengan impresi publik tentang keinginan pemerintah untuk melaksanakan penegakan hukum secara konsisten, pemberantasan KKN, serta dalam menciptakan penyelenggaraan pemerintahan yang amanah (*Good Governance*). Pada acara Perayaan Ulang Tahun ke-30 LP3ES malam tadi, misalnya, tokoh hukum senior Adnan Buyung Nasution dan Todung Mulya Lubis didepan para wartawan menyatakan keraguan mereka akan keseriusan pemerintah dalam upaya menegakkan hukum dan memberantas KKN. Memang, masih terlalu dini untuk menilai kinerja Jaksa Agung dalam

melaksanakan salah satu program pokok Kabinet; Melaksanakan penegakan hukum secara konsisten, mewujudkan rasa aman serta tentram dalam kehidupan masyarakat dan melanjutkan pemberantasan KKN. Mari kita beri Jaksa Agung kesempatan yang wajar untuk menunjukkan prestasinya.

Publik juga meragukan niat pemerintah ini untuk menegakkan penyelenggaraan pemerintahan yang amanah (*good governance*) walau pun penyelenggaraan pemerintahan oleh berbagai lembaga internasional seperti UNDP dan lembaga pendanaan dunia seperti Bank Dunia, ADB dan IMF telah dijadikan salah satu *credo* dalam proses demokratisasi dan pembangunan ekonomi. Dalam 6 program pokok KHR tidak dicantumkan secara eksplisit upaya dan langkah konkret untuk menciptakan *good governance*. Dalam susunan kabinet pun citra tersebut tidak jelas terpancar, seperti halnya penegakan hukum dan pemberantasan KKN. Mungkin, melalui program pokok dan susunan KGR ini Presiden Megawati Sukarnoputri memang ingin menunjukkan kepada bangsa bahwa misi pokok pemerintah ini adalah memulihkan kehidupan ekonomi nasional, menciptakan kerangka kehidupan politik demokratis yang stabil dalam kerangka NKRI, serta menyelenggarakan Pemilihan Umum 2004. Memang kita tidak dapat mengharapkan Kabinet ini akan mampu menciptakan banyak keajaiban dalam masa bakti yang hanya 3 tahun. Selamat bekerja KGR.

Yogyakarta, Oktober 2002